

TM Newsletter

2026 Target Pajak Naik Wajib Pajak Grup & Orang Kaya Masih Jadi Sorotan





Pemerintah sudah menyiapkan strategi besar untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2026. Fokus utamanya tetap sama: **Wajib Pajak Grup (WP Grup)** dan **High Wealth Individual (HWI)** atau orang-orang super kaya.

Kenapa mereka yang jadi sorotan? Karena kontribusinya sangat besar terhadap penerimaan negara. Nah, supaya pengawasan lebih efektif, pemerintah juga akan mengandalkan program khusus yang disebut Joint Program. Mari kita bahas lebih rinci.

Target Pajak 2026 : Angka Fantastis Yang Harus Dicapai

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah memasang target penerimaan PPh nonmigas Rp 1.209,36 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1.154,12 triliun diharapkan berasal dari setoran PPh nonmigas saja.

Target ini jelas bukan angka kecil. Apalagi kalau melihat tren beberapa tahun terakhir:

- 2023: PPh nonmigas tumbuh 7,8%.
- 2024: hanya tumbuh 0,4%.
- 2025 (prediksi): tumbuh tipis 0,1%.

Meski pertumbuhannya makin melambat, pemerintah masih optimis. Kenapa? Karena ekonomi nasional tetap stabil, meski ada tantangan besar seperti:

- penerapan tarif efektif rata-rata (TER),
- penurunan laba di sektor komoditas,
- hingga pergeseran penerimaan yang masih tercatat pada komponen pajak lainnya.

Kenapa WP Grup dan HWI Jadi Prioritas?

WP Grup adalah perusahaan-perusahaan besar dengan jaringan usaha luas, sementara High Wealth Individual (HWI) adalah individu dengan kekayaan sangat tinggi. Kedua kelompok ini dianggap punya peran dominan dalam penerimaan pajak, tapi di sisi lain juga rawan melakukan penghindaran pajak lewat skema yang kompleks.

Karena itu, pemerintah menempatkan mereka sebagai prioritas dalam strategi pengawasan pajak 2026. Harapannya, setiap potensi penerimaan bisa tergali maksimal tanpa kebocoran.



Joint Program: Senjata Utama Pengawasan Pajak

Untuk mengawal target tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan cara konvensional. Ada Joint Program, strategi kolaborasi antarunit di DJP dan lembaga lain, yang akan menjadi tulang punggung pengawasan pajak.

Bentuknya antara lain:

- Joint Audit: pemeriksaan pajak secara bersama-sama.
- Joint Analysis: analisis data keuangan dan transaksi lintas sektor.
- Joint Investigation: penyelidikan pajak berbasis kolaborasi.
- Joint Collection: penagihan pajak secara terkoordinasi.
- Joint Intelligence: pengumpulan dan pemanfaatan data intelijen.

Ruang lingkupnya luas, mulai dari data keuangan, perdagangan, pertambangan, hingga sektor-sektor lain yang dianggap berisiko tinggi. Data ini nantinya akan dipakai sebagai bahan pemeriksaan, penagihan, hingga langkah intelijen pajak.

Kepatuhan Pajak Bukan Sekedar Angka

Joint Program tidak hanya soal angka penerimaan, tapi juga menyasar pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menyiapkan berbagai instrumen pendukung, seperti:

- compliance improvement plan (rencana peningkatan kepatuhan),
- penegakan hukum dengan multidoor approach (pendekatan dari banyak pintu hukum),
- serta regulasi baru untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya ketat tapi juga adil, karena hak wajib pajak tetap dijaga.

Tantangan

Meski terlihat ideal, Joint Program tidak tanpa hambatan. Ada sejumlah risiko yang bisa memperlambat atau bahkan mengganggu pelaksanaannya, seperti:

- koordinasi antar lembaga yang kompleks,
- integrasi sistem teknologi yang belum sepenuhnya terhubung,
- kerahasiaan data wajib pajak yang harus dijaga ketat,
- hingga potensi resistensi dari wajib pajak yang merasa diawasi terlalu ketat.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah berkomitmen memperkuat regulasi serta mengembangkan sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi.

Kesimpulan: Pajak 2026 Adalah Soal Strategi

Dengan target pajak yang besar, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi alami. Pengawasan yang lebih tajam terhadap WP Grup dan orang kaya lewat Joint Program jadi kunci penting.

Bagi wajib pajak, ini artinya pengawasan akan semakin detail dan berbasis data. Namun di sisi lain, pemerintah juga memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak tetap dijaga.

Jadi, 2026 akan menjadi tahun penting di mana strategi, koordinasi, dan kepatuhan pajak benar-benar diuji.